

TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENJARAHAN TERHADAP RUMAH PEJABAT NEGARA DI INDONESIA

ABSTRAK

Penjarahan terhadap rumah Pejabat Negara adalah bentuk kejahatan yang berawal dari gejolak sosial dan ekonomi. Gejolak tersebut disebabkan oleh kebijakan dan pernyataan serta sikap dari Pejabat Negara yang memicu kemarahan publik. Masyarakat menggelar aksi demonstrasi atas gejolak tersebut, namun pendekatan yang tidak maksimal dari pemerintah mendorong timbulnya kerusuhan. Situasi tersebut menyebabkan kerusuhan yang semakin meluas sampai dengan tindakan penjarahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik peristiwa penjarahan yang ditinjau dari perspektif kriminologi dan menganalisis upaya perlindungan hukumnya terhadap Pejabat Negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Penelitian ini menghimpun sumber data sekunder, kemudian dianalisis melalui metode interpretasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa ilmu kriminologi dapat mengungkap penyebab penjarahan, alasan pelaku melakukan tindak pidana, dan upaya pencegahan. Selain itu, ditemukan bahwa perlindungan hukum bagi korban belum mencapai nilai-nilai dalam tujuan hukum menurut Gustav Radbruch. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang diterapkan tidak menyebutkan secara jelas tindak pidana penjarahan. Selain itu, sanksi pidana yang dijatuhkan tergolong ringan sehingga belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan bagi korban dan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus menjalin komunikasi yang baik dengan memberikan ruang dialog kepada masa aksi dan memperbaiki kualitas perlindungan hukum dengan merumuskan aturan yang spesifik.

Kata Kunci: Penjarahan, Pejabat Negara, Perlindungan Hukum

A CRIMINOLOGICAL AND LEGAL PROTECTION ANALYSIS OF THE CRIME OF LOOTING OF GOVERNMENT OFFICIALS' HOMES IN INDONESIA

ABSTRACT

The looting of government officials' homes is a form of crime that stems from social and economic unrest. This unrest is caused by policies, statements, and attitudes of government officials that provoke public anger. The public staged demonstrations in response to this unrest, but the government's inadequate response led to riots. This situation caused the riots to escalate, eventually resulting in looting. This study aims to identify the characteristics of looting incidents from a criminological perspective and to analyze legal protections for government officials. The method used in this study is a juridical-normative approach based on case studies and legislation. This study collected secondary data sources, which were then analyzed using interpretive methods. This study compiled secondary data sources, which were then analyzed using interpretive methods. The results revealed that criminology can shed light on the causes of looting, the reasons perpetrators commit criminal acts, and preventive measures. Furthermore, it was found that legal protection for victims has not yet met the values outlined in Gustav Radbruch's legal objectives. This is evident from the fact that the applicable statutes do not explicitly mention the criminal act of looting. Furthermore, the criminal penalties imposed are relatively lenient, thus failing to fully provide a sense of justice for victims or benefit society. Therefore, the government must foster effective communication by providing a space for dialogue with protest groups and improve the quality of legal protection by formulating specific regulations.

Keyword: *Looting, State officials, Legal Protection*